KR-Surya Adi Lesmana

***PUTAR BALIK MEMBAHAYAKAN:** Bus pariwisata dengan nomor polisi asal luar DIY memutar balik meskipun terdapat tanda larangan putar balik di Ring Road Timur Jalan Raya Janti, Karangjambe, Banguntapan, Bantul, tepatnya sebelah Selatan Jembatan layang, Rabu (21/6/2023). Selain berbahaya, hal tersebut sering menjadi pemicu kemacetan sekaligus menghambat pengendara lain yang melintas.*

Buruh Yogya Demo Tolak UU Cipta Kerja

YOGYA (KR) - Puluhan massa yang tergabung dalam Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) menggelar demonstrasi di Tugu Pal Putih Kota Yogyakarta, Rabu (21/6). Dalam aksinya ini, para buruh menolak penerapan UU Cipta Kerja yang dinilai inkonstitusional dan RUU Kesehatan.

Koordinator Umum MPBI Irsyad Ade Irawan mengatakan, seluruh buruh di Yogyakarta maupun penjuru Indonesia lainnya masih sama sikapnya yaitu menolak UU Cipta Kerja. Selain itu juga menolak pembahasan RUU Kesehatan karena menilai sejumlah pasal di dalamnya justru merugikan para buruh terutama yang bekerja di sektor tenaga kesehatan.

"Analisa dari kami, RUU Kesehatan berpotensi untuk mengurangi anggaran APBD dan APBN untuk biaya dan pembiayaan tenaga kesehatan. Berkaitan dengan BPJS Kesehatan, kami menginginkan pengelolaannya langsung di bawah Presiden bukan di bawah Kementerian Kesehatan," tegas Irsyad.

Usai menggelar aksi di Tugu Pal Putih, rombongan MPBI ini kemudian menuju Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY untuk demonstrasi dan melakukan audiensi. Ada sejumlah tuntutan yang disampaikan di antaranya terkait penyediaan rumah murah bagi buruh atau pekerja di DIY.

"Kami menuntut kepada Gubernur DIY untuk membangun perumahan buruh. Buruh di Yogyakarta kalau tidak dibantu oleh pemerintah sangat kesulitan memiliki rumah. Harga tanah di DIY ini sangat mahal sedangkan upah buruhnya tidak pernah naik signifikan," ucap Irsyad.

Sementara Kepala Disnakertrans DIY Aria Nugrahadi mengatakan, dalam audiensi pihak MPBI terkait tiga hal pertama penolakan terhadap UU Cipta Kerja, kedua bagaimana akses perumahan bagi teman-teman pekerja yang terjangkau dan ketiga adalah pengembangan koperasi buruh sebagai tambahan kesejahteraan di luar upah. "Kami di Disnakertrans tidak bisa sendiri dalam memecahkan masalah ini maka beberapa OPD terkait kita libatkan agar masalah dari teman-teman serikat pekerja ini bisa difasilitasi program ke depannya," urainya. **(Dev)-d**

PUNGLI DI RUTAN DIUSUT TUNTAS

KPK Copot Pegawai yang Terlibat

JAKARTA (KR) - Motif pungutan liar (pungli) di rumah tahanan (rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini tengah didalam lebih lanjut oleh KPK yang jumlahnya mencapai Rp 4 miliar pada periode Desember 2021-Maret 2022. Terhadap hal ini sebelumnya, Dewan Pengawas KPK mengumumkan temuan pungli di rutan KPK dan meminta kepada jajaran pimpinan KPK untuk menindaklanjuti temuan tersebut.

"Itu sedang kami dalami apa yang kemudian diberikan, jasa dalam tanda kutip yang diberikan. Kalau kemudian betul ada, dugaan pidananya seperti apa itu masih kami dalami," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (21/6).

Penyelidikan terhadap kasus pungli tersebut, menurutnya, tidak berhenti di petugas rutan. Selain itu, KPK juga mendalami dugaan adanya pihak luar yang turut terlibat dalam kasus pungli tersebut.

"Jadi, dalam hal ini termasuk juga pendalaman apakah ada pihak lain di luar KPK yang memanfaatkan situasi ini, dalam pengertian dia ikut turut serta misalnya membantu sehingga beberapa pihak di luar itu memberikan sejumlah uang dan masuk ke oknum pegawai KPK," tutur Ali.

Untuk itu KPK juga memastikan akan menyelidiki dugaan pasal pidana dalam kasus tersebut. Apakah gratifikasi, suap, atau pemerasan. "Itu kita lihat nanti," tegas Ali.

Sementara Sekretaris Jenderal KPK Cahya Harefa memastikan akan mencopot seluruh pegawai yang terlibat dalam kasus dugaan pungutan liar di Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK di Gedung Merah Putih Jakarta Selatan. "Kami akan melakukan pembebasan sementara dari tugas jabatan terhadap para pihak yang diduga terlibat," katanya.

Cahya mengatakan, pencopotan para pegawai tersebut dari tugas dan jabatan adalah untuk mempermudah pemeriksaan dan tidak mengganggu kegiatan rutan apabila para pihak tersebut dipanggil untuk diperiksa.

Terpisah, peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Yogyakarta Zaenur Rohman menyebut temuan pungli di Rutan KPK yang jumlahnya mencapai Rp 4 miliar harus diusut tuntas.

"Pungli ini harus diusut sampai tuntas. Tidak hanya kepada mereka-mereka yang menerima uang, tetapi saya melihat ini ada beberapa track yang harus dilalui," ujarnya. **(Ant/Ful)-d**

Sidang Johnny G Plate Digelar 27 Juni

JAKARTA (KR) - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjadwalkan sidang perdana mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate akan digelar pada 27 Juni 2023. Agenda sidang tersebut, Johnny G Plate akan mendengarkan pembacaan dakwaan.

"Sidang perkara ini akan digelar pada 27 Juni 2023," kata Humas PN Jakarta Pusat Zulkifli Atjo di Jakarta, Rabu (21/6). Menurutnya, perkara Johnny G Plate tersebut diberi nomor registrasi No.55/Pid Sus./PN.Jkt.Pst/2023. Fazhal Hendri Asalah sebagai ketua majelis hakim dengan anggota Rianto Adam Ponto dan Sukarono.

Dalam perkara ini Johnny G Plate ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi penyediaan infrastruktur Base Tranceiver Station (BTS) dan infrastruktur pendukung Kominfo periode 2020-2022. Johnny G Plate disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. **(Ful)-f**

BPKH Sosialisasi Pengawasan Keuangan Haji

YOGYA (KR) - Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan haji di tengah penyelenggaraan ibadah haji 1444 H, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bersama Anggota Komisi VIII DPR RI, My Esti Wijayati mengadakan diseminasi strategi pengelolaan, pengawasan keuangan haji serta sosialisasi BPIH 1444 H. Kegiatan ini menjadi salah satu bagian penting dalam mensosialisasikan pengelolaan keuangan haji oleh BPKH kepada masyarakat.

Kegiatan ini diadakan di Yogyakarta, Rabu (21/6), dihadiri anggota Dewan Pengawas BPKH Heru Muara Sidik, anggota Komisi VIII DPR My Esti Wijayati, Kabid PHU Kanwil Kemenag DIY Aidi Johansyah dan tokoh masyarakat.

Kegiatan ini bertujuan memberikan edukasi mengenai strategi dan pengawasan keuangan haji agar masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan tepat dari BPKH bersama Komisi VIII DPR RI.

Anggota Dewan Pengawas BPKH, Heru Muara Sidik menjelaskan, posisi keuangan haji saat ini sehat dan telah berjalan mendukung pelaksanaan haji 1444H/2023 M. Selain itu, BPKH juga siap memberikan nilai manfaat untuk kuota tambahan sebanyak 8.000 jemaah.

Hingga akhir Mei 2023, posisi dana kelolaan setelah dilakukannya pelaksanaan transfer penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023 ke Kemenag telah mencapai Rp 155,805 triliun dengan nilai manfaat pada bulan Mei 2023 sebesar Rp 4,63 triliun dan akan terus bertambah.

Heru Muara Sidik menambahkan, setiap tahun terdapat peningkatan pengelolaan keuangan haji yang berarti juga memberikan nilai manfaat bagi calon jemaah haji.

Dana haji saat ini diinvestasikan di instrumen syariah sesuai undang-undang dan wajib menjaga likuiditas sebesar 2,22 x biaya penyelenggaraan ibadah haji dengan presentase investasi 70,5% dan penempatan bank syariah 29,5%, solvabilitas 102,74% dan Yield 6,28%.

BPKH dalam megelola dana haji dilakukan secara transparan, dipublikasikan dan di audit BPK dan diawasi DPR. Selain itu, juga memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK 4 Tahun Berturut-turut. **(Obi)-f**

MUHAMMADIYAH UCAPKAN TERIMA KASIH

Libur Idul Adha, Dorong Ekonomi Daerah

JAKARTA (KR) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, penambahan hari libur atau cuti bersama pada Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah/2023 Masehi dilakukan demi mendorong roda ekonomi di tengah masyarakat.

"Ya, itu kan terutama harinya memang memerlukan waktu yang lebih untuk mendorong ekonomi utamanya di daerah agar lebih baik lagi," kata Presiden Jokowi di Pasar Parungpung, Bogor, Jawa Barat, Rabu (21/6).

Menurut Presiden, penambahan hari libur pada Idul Adha ini bisa meningkatkan kegiatan pariwisata di daerah. Oleh sebab itu, Pemerintah akhirnya memutuskan menambah hari libur pada Idul Adha. "Utamanya di bidang pariwisata lokal, jadi karena kita lihat bisa, ya diputuskan," kata Jokowi.

Pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri menetapkan tanggal 28 dan 30 Juni 2023 sebagai cuti bersama Idul Adha 1444 H/2023 M. Sedangkan 29 Juni 2023 merupakan Hari Libur Nasional Hari Raya Idul Adha 1444 H/2023 M.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo karena telah memenuhi aspirasi Muhammadiyah terkait penambahan libur Idul Adha, dan menjadi bukti bahwa Pemerintah menunjukkan komitmen kuat terhadap prinsip-prinsip konstitusi.

"Penambahan tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah terhadap konstitusi terutama dalam menjamin kemerdekaan warga negara untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinannya," ujar Mu'ti.

Mu'ti mengatakan, Pemerintah telah menjamin kemerdekaan beragama dan kebebasan warga negara untuk melaksanakan ibadah sesuai keyakinan mereka. Keputusan ini memberikan jaminan kepada umat Islam bahwa mereka dapat melaksanakan ibadah Salat Idul Adha dengan aman, tenang, dan damai.
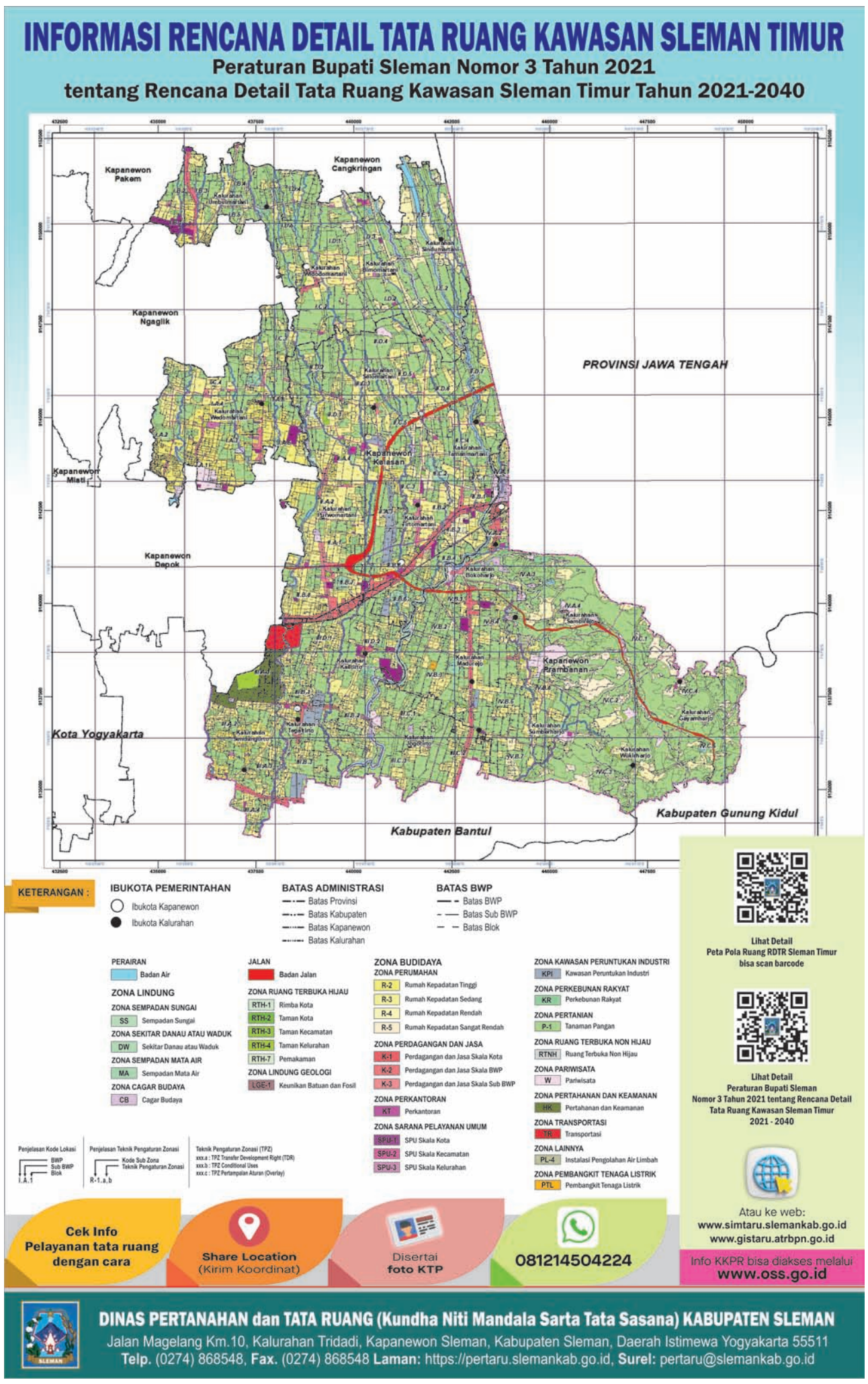
Mu'ti mengimbau seluruh warga Muhammadiyah untuk menjaga kerukunan, saling menghormati, dan menjaga ketertiban umum. Ia juga mengajak agar warga Muhammadiyah menjalankan ibadah dengan tertib, mematuhi aturan dan regulasi yang berlaku, termasuk dalam pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. "Kepada warga Muhammadiyah dan umat Islam yang merayakan Idul Adha pada 28 Juni hendaknya senantiasa menjaga kerukunan, saling menghormati, dan menjaga ketertiban umum," katanya. **(Ant/San)-f**